



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1395 /SEK/OT.01.1/06/2022 Jakarta, 16 Juni 2022
Hal : Langkah-Langkah Persiapan Pelaporan Kinerja
Anggaran Semester I TA 2022 Melalui Aplikasi SMART-DJA

- Yth. 1. Para Sekretaris Eselon I;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
3. Kepala Biro Keuangan;
4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan; dan
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan.

Di -
Tempat

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-12/AG/AG.8/2022 tanggal 05 April 2022 perihal Langkah-langkah Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran Triwulan I TA 2022 melalui Aplikasi SMART serta dalam rangka Persiapan Pelaporan Monitoring Kinerja Anggaran Semester I TA 2022, bersama ini disampaikan langkah-langkah persiapan pelaksanaan monitoring kinerja anggaran pada Semester I TA 2022, sebagai berikut:

1. Melakukan optimalisasi dan pemantauan atas ketertiban pelaporan pencapaian kinerja anggaran Triwulan I TA 2022. Terhadap Unit Eselon I yang capaian kinerja anggarannya belum maksimal sebagaimana target yang sudah ditetapkan pada awal Tahun, untuk segera dikoordinasikan dengan pengelola keuangan dan diupdate realisasi anggarannya serta capaian kerjanya.
2. Pada level K/L c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi:
 - a. Melaporkan / input data realisasi Indikator Kinerja Sasaran pada Aplikasi SMART;
 - b. Melakukan konfirmasi dan validasi atas Realisasi Indikator Output Program yang telah diinput oleh Unit Eselon I;
 - c. Konfirmasi atas Laporan Triwulan I yang telah dilaporkan oleh Unit Eselon I.
3. Pada level Unit Eselon I:
 - a. Melaporkan (input data) realisasi Indikator Output Program dan Realisasi Indikator Kinerja Program pada Aplikasi SMART;
 - b. Melakukan konfirmasi/validasi atas pelaporan Realisasi Volume RO yang telah dilaporkan Satker;
 - c. Melakukan konfirmasi atas Laporan Triwulan I TA 2022 yang telah dilaporkan Satker;
 - d. Melakukan pelaporan Evaluasi Kinerja Anggaran Triwulan I TA 2022 tingkat Unit Eselon I pada Aplikasi SMART.

4. Pada level Satker, yaitu Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama:
 - a. Memastikan pengisian SAKTI/SAS sesuai ketentuan sumber data *real time* yang terintegrasi ke Aplikasi SMART, yaitu ;
 - Realisasi anggaran per RO;
 - Realisasi Volume RO;
 - Progres; dan
 - Keterangan.
 - b. Memastikan Realisasi Volume RO, Progres dan Keterangan apakah telah terisi pada kolom Data Integrasi pada Aplikasi SMART;
 - c. Pada kolom Data Integrasi yang sudah di input data hingga batas waktu yang telah ditentukan, apabila terdapat ketidaksesuaian antara data dengan kondisi riil, mohon untuk dilakukan perbaikan pada aplikasi SMART di kolom KOREKSI;
 - d. Melakukan pelaporan Evaluasi Kinerja Anggaran Triwulan I TA 2022 pada Aplikasi SMART.
5. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta agar Saudara dapat menindaklanjuti langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, 3 dan 4 paling lambat pada tanggal 5 Juli 2022 pukul 00.00 WIB untuk selanjutnya akan dilakukan pengukuran capaian Nilai Kinerja Anggaran Triwulan I TA 2022 oleh Kementerian Keuangan RI c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.
6. Apabila terdapat kendala/permasalahan dalam pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana tersebut di atas, dipersilahkan untuk menyampaikan kepada Bagian Bimbingan dan Monitoring Biro Perencanaan dan Organisasi melalui surel (email) renogbimon@gmail.com atau PIC di masing-masing Unit Eselon I.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Panitera Mahkamah Agung;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN;
6. Kepala Badan Pengawasan;
7. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan;
8. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada (4) Empat Lingkungan Peradilan;
9. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada (4) Empat Lingkungan Peradilan.